



# CALL FOR AN URGENT JUSTICE MECHANISM for Repatriated Migrant Workers

## Seruan desakan untuk Mekanisme Keadilan pemulangan Pekerja Migran

Pandemi COVID-19 telah berdampak parah pada jutaan pekerja migran di negara-negara tujuan, banyak dari mereka telah mengalami kehilangan pekerjaan atau upah yang tidak dibayar, dipaksa oleh majikan untuk mengambil cuti yang tidak dibayar atau pengurangan upah, dikurung dalam kondisi keterlibatan dalam pilihan-pilihan atas pekerjaan mereka hidup yang buruk, dan dengan sedikit atau tanpa. Banyak pekerja migran juga berjuang dengan dilema dalam menggunakan hak mereka untuk pulang dalam keadaan seperti ini, sementara sisanya yang lain terlantar di kota-kota tanpa akses dan dukungan, atau di daerah-daerah perbatasan, hidup dalam kondisi sulit yang disamakan sebagai fasilitas karantina.

Negara-negara tujuan dan asal telah memulai prosedur repatriasi/pemulangan pekerja-pekerja ini, tanpa memikirkan kesulitan mereka dan menyatakan bahwa pemulangan tidak dapat dihindarkan. Jutaan orang akan dipulangkan ke situasi jeratan hutang karena mereka akan dipaksa untuk membayar biaya perekrutan dan biaya-biaya lainnya, meskipun kembali dengan tangan kosong.

Dalam kondisi di atas, pemulangan menimbulkan tantangan tambahan, karena, tanpa kontrol yang tepat, pengusaha dapat mengambil keuntungan dari program pemulangan massal untuk memberhentikan dan memulangkan pekerja yang belum dibayarkan iuran kompensasinya, gaji dan manfaat-manfaat lainnya. Tanpa memastikan bahwa perusahaan-perusahaan dan majikan berupaya tuntas untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia dan hak-hak buruh pekerja migran yang dipulangkan, negara-negara di lintas koridor migrasi akan terlibat dalam mengawasi prosedur jutaan pekerja yang akan kembali tanpa upah yang mereka kumpulkan atau bagaimana keluhan ditempat kerja mereka terdengar, maupun melihat keadilan dalam disituasi mereka.

Ini merupakan pelanggaran berat terhadap hak-hak kerja mereka dan pemberian kompensasi upah/penghasilan layak pada pekerjaan tersebut. Pencurian upah akan menghasilkan jutaan dolar yang merugikan pekerja dan keuntungan pada perusahaan dan pengusaha yang akan bebas dari pertanggungjawaban apa pun, bahkan jika negara dan bank cenderung memperpanjang saluran bantuan untuk membangun kembali diri mereka sendiri dan menyesuaikan diri dengan normal baru.

Prosedur pemulangan telah dilakukan dengan tergesa-gesa oleh negara-negara asal dan tujuan, tanpa mekanisme ganti rugi yang layak, karena pengadilan dan mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan lainnya juga telah ditutup selama periode penguncian. Oleh karena itu, pelanggaran ini akan menumpuk dan tidak ditangani atau dibebankan pada mekanisme penyelesaian sengketa yang ada.



*Dalam hal ini, Forum Migran di Asia (MFA), Jaringan Pengacara Lintas Batas (LBB), Pusat Lintas Regional untuk Migran dan Pengungsi (CCRM), Dewan Serikat Buruh Asia Selatan (SARTUC), dan Pusat Solidaritas (SC) menyerukan pada negara-negara asal dan tujuan untuk segera menerapkan mekanisme keadilan transisional ini dengan tujuan sebagai berikut:*

1. Mekanisme keadilan transisional akan menangani pengaduan, klaim, dan perselisihan perburuhan dari pekerja yang dipulangkan dan telah kehilangan pekerjaan karena pandemi. Bahwa mekanisme tersebut harus bebas biaya, dipercepat, dapat diakses, terjangkau dan efisien.
2. Memprioritaskan jaminan bahwa semua pekerja yang dipulangkan dengan klaim yang sah dapat mengakses keadilan dan semacam kompensasi.
3. Sementara itu, sangatlah penting untuk memastikan bahwa kasus diselesaikan sesegera mungkin, tanpa penundaan, terutama dalam kasus yang melibatkan perselisihan perburuhan, perlindungan harus diberlakukan untuk memastikan bahwa migran dapat melanjutkan kasus mereka setelah kembali. Hal terpenting lainnya adalah dukungan ke penasihat hukum, memfasilitasi prosedur surat kuasa, dan pelanggaran persyaratan untuk kesaksian langsung dan kehadiran dalam pengadilan atau mekanisme kehadiran didepan pengadilan / pengaduan.
4. Negara harus mewajibkan majikan dan pebisnis untuk menyimpan semua catatan pekerjaan, termasuk daftar gaji, daftar karyawan, dan jam kerja dan memungkinkan pekerja untuk membawa salinan catatan mereka.

Jika kita ingin 'Membangun Kembali Lebih Baik', kita tidak dapat terus menutup mata terhadap masalah pencurian upah yang telah berlangsung lama dilintas koridor migrasi selama bertahun-tahun, dan tidak akan pernah terjadi sebelumnya dalam kasus pekerja migran yang dipulangkan dalam pandemi COVID 19.

Banyak pekerja migran telah berdamai dengan situasi pencurian upah dalam bentuk upah yang tidak adil atau tidak dibayar selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun sebelum pandemi COVID 19. Mereka menerimanya sebagai takdir mereka dan menahan diri untuk tidak mengeluh kalau-kalau mereka kehilangan pekerjaan, atau, yang terburuk, hidup di bawah rasa takut status mereka dibuat tidak berdokumen.

Setiap tahun, jutaan dolar hilang dalam potensi pengiriman uang karena pencurian upah, bahkan ketika negara-negara asal terus mengeksplorasi pasar-pasar baru untuk penempatan pekerja migran sementara negara-negara tujuan berkembang pesat dengan keberadaan tenaga kerja migran murah dan dapat dieksploitasi.

Pemulangan pekerja migran tanpa uji tuntas oleh negara pada saat pandemi COVID 19 hanya akan berfungsi untuk meninggalkan ketidakadilan yang tak terjaga yang ditanggung pekerja migran, membebaskan pengusaha dan pelaku kekerasan terhadap pekerja migran, dan menghapus semua catatan klaim yang sah dan keluhan-keluhan.



Jutaan orang yang akan dipulangkan akan mempengaruhi lintasan pembangunan keluarga, dimana satu pekerja migran merupakan sumber harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Mimpi ini, ketahanan perjalanan migran ini tidak boleh tertahan sebagaimana pandemi COVID 19 juga berjalan dengan sendirinya.

Jika tidak ditangani pada saat ini, kami berisiko selamanya menghapus pola yang menghubungkan migrasi dengan pembangunan, karena kisah-kisah kehidupan pekerja migran akan menjadi saksi ketidakadilan massa ini selama bertahun-tahun dimasa yang akan datang.



**LAWYERS  
BEYOND  
BORDERS**





## ENDORSED BY:

All Nepal Peasants' Federation (ANPF)  
ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR)  
Asian Peoples' Movement on Debt and Development (APMDD)  
Building and Wood Workers International (BWI) Asia Pacific  
Business & Human Rights Resource Centre  
Civil Society Action Committee (AC)  
Civil Society Women Organization (CSWO)  
Campaign for Good Governance-SUPRO  
DIGNIDAD Coalition  
Environics Trust  
Equidem  
Equidem Nepal  
Fishworkers Forum  
Focus on the Global South  
Freedom from Debt Coalition  
Growthwatch India  
HIMALAYA Nithi Abhiyan  
Human Rights Watch  
Indian Social Action Forum  
International Trade Union Confederation (ITUC)  
Migrant-Rights.Org  
Mines Minerals and People  
National Network for Safe Migration (NNSM)  
Pacific Islands Association of Non-Government Organisations (PIANGO)  
Pakistan Kissan Rabita Committee (PKRC)  
Public Services International (PSI)  
Sanlakas Philippines  
UNI Asia and Pacific (UNI APRO)  
Woman Health Philippines